

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan prasarana dan sarana, terutama jalan di Indonesia, sudah semakin banyak dilaksanakan dan berkelanjutan secara berkala. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan, usulan usulan proyek pembangunan dan peningkatan prasarana jalan disusun berdasarkan skala kebutuhan dan urgencitas (*need and urgency*) yang kemudian dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP). Dan selanjutnya akan disetujui oleh pihak yang berwenang, melalui proses dan pengkajian dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Akan tetapi, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa ketidaksesuaian antara keadaan asli di lapangan dengan usulan-usulan yang disampaikan ke rencana pembangunan daerah, baik dari segi teknis maupun dari segi kebutuhan masyarakat sekitar.

Dalam hal ini, adanya celah dalam proses penentuan pemilihan atas jenis struktur perkerasan jalan. Ada beberapa metode untuk mengambil keputusan penentuan rencana jenis perkerasan jalan. Dan yang selama ini diketahui umumnya adalah penentuan struktur perkerasan jalan, berdasarkan data kerusakan jalan dan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), yang selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) (Nurtanto, 2015)

Salah satu faktor yang diduga menyebabkan kondisi diatas adalah terlalu dominannya para pengambil kebijakan (*stake holder*) dalam menetapkan penanganan proyek jalan tanpa didasari atas pertimbangan-pertimbangan obyektif seperti unsur kepentingan dan kebutuhan. Akibatnya, banyak proyek yang seharusnya menggunakan sistem tertentu atau dalam skala prioritas tertentu dapat berubah ke sistem yang lain atau prioritas lain.

Metode yang dilaksanakan sebelumnya, adalah dengan berpedoman pada beberapa kepentingan, seperti adanya keterbatasan alokasi dana untuk pekerjaan jalan di daerah, kepentingan beberapa pihak yang tidak sesuai

dengan kondisi sosial ekonomi yang ada di lokasi proyek, dan kepentingan-kepentingan lain yang mendominasi dari pengambil keputusan di tingkat pemerintahan pusat.

Demikian pula ada pertimbangan kriteria-kriteria yang berbeda-beda setiap daerah dan perilaku tertentu yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh dalam menetapkan jenis struktur perkerasan jalan. Dengan memberikan kriteria yang bermacam-macam, antara lain : keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan; kemudahan pelaksanaan pekerjaan; biaya konstruksi dan umur rencana; ketersediaan sumber daya alam; kondisi daya dukung eksisting jalan; perawatan setelah masa pemeliharaan; curah hujan dan iklim; LHR jalan; permintaan/ kebutuhan masyarakat lokal. Akan memunculkan penentuan pemilihan alternatif jenis struktur perkerasan jalan tersebut.

Dengan alasan tersebut, perlu adanya suatu metode pendekatan ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memutuskan perencanaan jenis perkerasan jalan, sehingga dapat mengurangi unsur subyektivitas para pengambil kebijakan. Salah satu metode ilmiah dimaksud adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu suatu metode yang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam bidang pengambilan keputusan dan manajemen (Nurtanto, 2015)

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menerapkan metode AHP dalam kepentingan perumusan dan pengambilan keputusan, umumnya dalam bidang teknik sipil dan khususnya pada pekerjaan perkerasan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Diharapkan melalui studi ini dapat dibuktikan bahwa, metode AHP ini cukup handal dalam membantu para pengambil kebijakan dalam proses pengambilan keputusan yang obyektif. Dengan demikian, kerumitan dan ketidaksesuaian dalam penentuan pembangunan jalan dapat dikurangi.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam proses perencanaan perkerasan jalan yang terkait pada proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang – Kepanjen, perlu adanya pihak-pihak perencana dalam memprioritaskan beberapa kriteria dalam perencanaan tersebut. Dan setelah itu baru kemudian dilakukan pemilihan atas alternatif jenis perkerasan jalan yang umumnya

dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu perlu menggunakan suatu metode pengambil keputusan, yang dalam hal ini dipergunakan Analisa Hirarki Proses, supaya keputusan yang diambil dalam pemilihan jenis perkerasan jalan tersebut benar obyektif dan memenuhi sasaran semua pihak.

1.3 Rumusan Masalah

Terkait pada proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang - Kepanjen. Penulis mendapatkan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bobot urutan/ ranking dari kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan jenis perkerasan jalan di proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang - Kepanjen?
2. Bagaimanakah bobot urutan/ ranking atas alternatif-alternatif jenis perkerasan jalan yang umumnya dipergunakan di Indonesia, pada proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang - Kepanjen?

1.4 Batasan Masalah

Agar lebih terarah, dan mengacu sepenuhnya pada studi kasus proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang - Kepanjen. Maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan jenis struktur perkerasan jalan secara umum didasarkan hanya pada kondisi eksisting jalan.
2. Penilaian-penilaian atas kriteria perencanaan dan pemilihan jenis perkerasan jalan didapat dari pendapat para ahli, dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik sipil yang dalam riset ini dijadikan sebagai responden
3. Penelitian ini dilakukan hanya berdasar pada metode *Analytic Hierarchy Process*.

1.5 Tujuan Penelitian

Hasil akhir nanti, penulis bermaksud untuk memperoleh tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisa bobot urutan/ ranking atas kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dan kebijakan dalam memilih alternatif jenis perkerasan jalan.
2. Menganalisa bobot urutan/ ranking atas alternatif-alternatif jenis perkerasan jalan, atas studi kasus proyek Preservasi Rekonstruksi Jalan Sidoarjo – Pandaan – Purwosari – Malang – Kepanjen.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai nanti, diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan (*stake holder*) dalam mengambil keputusan atas perencanaan pekerjaan jalan. Baik ditingkat propinsi maupun daerah.
3. Membantu memberikan arah sesuai fungsi dan manfaatnya, dalam proses pekerjaan pembangunan jalan atas dasar prioritas dari kriteria-kriteria perencanaan perkerasan jalan tersebut. Sehingga pihak pemerintah di lain waktu dan tempat, dapat memperoleh bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penentuan jenis perkerasan jalan.

